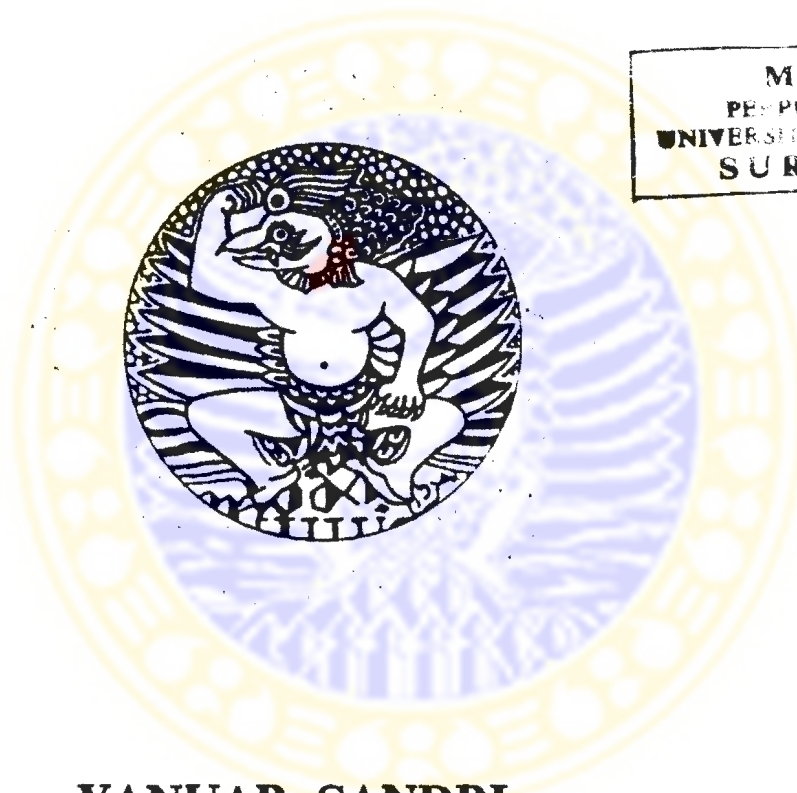


KIK
Per 03/01
San
p

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
TERHADAP TRANSAKSI TANPA WARKAT
DI PASAR MODAL**



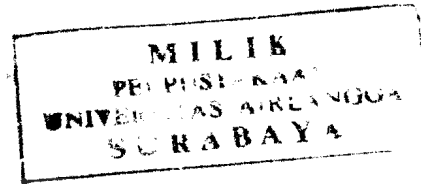
MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

YANUAR SANDRI

NIM. 039714536

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
TERHADAP TRANSAKSI TANPA WARKAT
DI PASAR MODAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dra. Hj. Soendari Kabat.

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
NIP. 130675517

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Yanuar Sandri.

Yanuar Sandri
NIM. 039714536

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Sistem perdagangan saham dengan menggunakan sistem transaksi tanpa warkat (*scripless trading*) adalah suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik. Pada perdagangan tanpa warkat seluruh bentuk saham akan dikonversikan kedalam data elektronik dan disimpan pada Lembaga Penitipan Sentral (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Penyelesaian transaksi tanpa warkat ini diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan diterapkannya perdagangan tanpa warkat ini diharapkan alur perdagangan tanpa warkat akan semakin lancar. Lancarnya alur transaksi di bursa akan menciptakan suasana perdagangan yang baik sehingga kondisi perdagangan saham yang wajar, teratur dan efisien akan dapat tercapai.
- Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi tanpa warkat di bursa kiranya sudah diatur dalam perundang-undangan di bidang pasar modal. Baik dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang didalamnya mengatur mengenai otoritas Badan Pengawas Pasar Modal, juga pada peraturan-peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Transaksi Tanpa Warkat (*scripless*

trading). Perlindungan hukum bagi investor juga dapat dilihat dari adanya fungsi penjaminan pada Lembaga Kliring dan Penjaminan sehingga kepastian terselesaikannya transaksi yang dilakukan oleh investor di bursa akan lebih terjamin. Perlindungan hukum bagi investor juga dapat kita lihat pada kemungkinan pembatalan transaksi yang dilakukan akibat adanya *force majeure* yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Mengingat dalam transaksi tanpa warkat semua kegiatan transaksi dilakukan secara komputerisasi yang rentan terjadi kerusakan pada sistem perdagangannya.

2. Saran

- Salah satu hambatan dilaksanakannya transaksi tanpa warkat adalah belum terkonversinya seluruh saham dalam data elektronik. Hal ini disebabkan selain terbatasnya peralatan yang memadai juga disebabkan jumlah saham yang sangat banyak yang perlu dikonversikan. Adanya biaya konversi yang harus dikeluarkan mengakibatkan masih sedikit saham-saham yang sudah dikonversikan kedalam data elektronik. Hal ini disebabkan masih belum stabilnya perekonomian di Indonesia yang menyebabkan turunnya harga-harga saham secara umum. Adanya biaya untuk konversi saham ini tentunya akan sangat memberatkan. Oleh karena itulah sebaiknya pelaksanaan sistem transaksi tanpa warkat walaupun sangat mendesak pemberlakukannya dapat ditunda sampai semua saham- saham yang sekarang ini diperdagangkan di bursa di konversikan ke dalam data elektronik. Selain konversi saham hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan adalah

sarana perdagangan saham yang belum siap sehingga jalannya sistem transaksi tanpa warat ini masih belum sempurna. Oleh karena itulah perlu sesegera mungkin penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya sistem perdagangan ini di persiapkan dan diperbaiki dalam hal ini standarisasi peralatan perdagangan.

- Perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai sistem transaksi tanpa warkat (scripless trading) kepada masyarakat pada umumnya maupun para pelaku pasara modal pada umumnya. Sehingga pada saat pelaksanaan sistem transaksi tanpa warkat ini para pelaku pasar modal sudah siap untuk menjalankannya. Hal ini disebabkan selama ini informasi tentang sistem transaksi tanpa warkat sangat sulit diperoleh terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur perlaksanaan transaksi tanpa warkat.